

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Tebangi Ratusan Pohon, Ngawur Itu

Budayawan Protes Keras Revitalisasi Monas

JAKARTA—Budayawan dan rohaniawan Antonius Benny Susetyo "bereriak" keras menyikapi revitalisasi kawasan Monumen Nasional (Monas) oleh Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, revitalisasi tersebut mengabaikan prinsip nilai-nilai budaya, sejarah, dan lingkungan hidup.

"Yang (revitalisasi) di Monas itu ngawur itu," ungkap budayawan yang akrab dipanggil Romo Benny itu. Menurutnya, Monas adalah cagar budaya. Dengan begitu pengelolaannya harus memperhatikan aspek historisnya. Begitu pula untuk menata kembali Monas perlu memperhatikan aspek-aspek historis dan kebudayaan. "Termasuk harus memperhatikan eksistensi tumbuh-tumbuhan yang ada di sana," ungkapnya.

Nah yang penataan sekarang mengabaikan tinjauan seperti ini. Jadi penataan yang sekarang ini lebih menekankan pembangunan fisik saja. Sementara aspek-aspek budaya dan sejarah diabaikan." Kalau Monas adalah cagar budaya maka Pemprov DKI harus patuh dengan aturan yang ada," ungkap Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut.

Benny mencontohkan, seperti Gereja Katedral itu kalau renovasi harus izin keteta karena itu cagar budaya. Kalau merenovasi tidak boleh merubah keasliannya. Cagar budaya harus dipertahankan. "Makanya untuk merenovasi perlu izin. Meskipun itu proyek Pemprov DKI tetap harus izin ke Setkab," cetusnya.

Izin sangat penting karena menyangkut eksistensi Monas sebagai cagar budaya dan situs sejarah. Maka untuk merenovasi atau menata kembali menggunakan prinsip kehati-hatian. Tidak bisa penataan itu hanya bersifat fisik semata. Seperti dengan menebang ratusan pohon seharusnya itu dihindari. "Sebenarnya kalau memang menggunakan prinsip penataan lingkungan seharusnya tidak mengorbankan pohon," ucap Benny.

Karena, pohon atau tumbuhan juga memiliki nilai-nilai historis dan fungsi lingkungan. Ditanya penataan tersebut untuk mendukung ajang Formula E, Benny sungguh menyayangkannya. Sebab Monas itu punya peran sejarah dan punya nilai sejarahnya tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan yang lain. Pohon-pohon juga harus dipertahankan.

"Pentaan itu tidak berarti merusak eksistensi ekosistem alam. Karena pohon-pohon di Monas juga berfungsi sebagai cagar budaya. Jadi jangan sampai merusak tatanan alamnya," pungkasnya. Jadi, menurut Benny, dalam pembangunan itu harus ada kesadaran pelestarian sejarah dan kesadaran lingkungan.

Menurutnya, pembangunan bukan sekadar membangun secara fisik. Membangun tetap harus memperhatikan aspek-aspek historis dan lingkungannya. "Tanaman, pohon-pohon di Monas harus tetap dijaga karena memiliki nilai-nilai historis dan lingkungan hidup tadi," tegasnya.

PSI Jakarta Ngadu ke KPK

Kawasan Monas yang asri ternoda oleh pekerjaan yang disebut sebagai revitalisasi. Alih-alih menjadi sejuk dan ramah lingkungan, area Monas malah berubah gersang sehingga mendapat protes keras berbagai kalangan. Ditambah lagi, kejelasan pelaksanaan proyek ini masih menjadi tanda tanya.

"Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta menduga bahwa asal-usul kontraktor proyek besar tersebut tidak jelas dan meminta KPK menelusuri proyek tersebut," kata Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta Patriot Muslim, Kamis (23/1/2020).

Dari website lpse.jakarta.go.id, terang dia, bisa ditemukan data terkait nama kontraktor pemenang lelang yakni PT Bahana Prima Nusantara, harga negosiasi untuk merevitalisasi Kawasan Monas itu senilai Rp 64,4 miliar. Alamat kantor di Jalan Nusa Indah No. 33, Ciracas, Kec. Ciracas, Kota Jakarta Timur.

"Tim Advokasi PSI telah menelusuri alamat tersebut yang ternyata berlokasi di sebuah gang di kawasan permukiman," ujar dia. Sementara itu, terkuak bahwa PT Bahana Prima Nusantara menyewa kantor virtual di lokasi tersebut. Beredar kabar bahwa kantor asli PT Bahana Prima Nusantara beralamat di Jalan Letjend Suprpto Nomor 60, Jakarta Pusat.

"Namun, setelah ditelusuri berbagai pihak dan media, tidak juga ditemukan lokasi sebenarnya perusahaan tersebut," imbuh dia. Persoalan alamat kantor PT Bahana Prima Nusantara ini masih simpang siur. Di mana alamat yang sebenarnya.

"Jika kontraktor tidak memberikan informasi yang benar saat proses lelang, maka itu masuk pelanggaran," cetus dia. Karena alamat yang tidak jelas, lanjut Patriot, patut diduga PT Bahana Prima Nusantara

adalah perusahaan bendera. Menurut Patriot, jika benar kontraktor adalah perusahaan bendera atau bahkan perusahaan kertas maka perlu dilakukan pemeriksaan untuk memperjelas pelaksanaan kontrak proyek ini apakah sudah sesuai hukum atau berpotensi merugikan negara.

Bisa jadi, tegas dia, PT Bahana Prima Nusantara adalah semacam perusahaan kertas atau paper company yang tidak memiliki aset dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan.

"Jika dia mengalihkan pekerjaan ke pihak lain atau melakukan praktek subkontrak, maka ini juga pelanggaran berat," ucap dia.

Patriot menambahkan, sejak awal PSI menyatakan siap kawal uang rakyat. Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. "PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenkanya dipertainkan seperti ini," tandas dia.

Patriot juga mengatakan, pihaknya membawa dokumen soal lpse. Ada hasil penelusuran pihaknya ke kantor kontraktor tersebut dan bukti foto lainnya. "Masih banyak yang harus didalami makanya kita ingin bersinergi dengan KPK sampai bisa menjernihkan masalah ini. Jangan sampai kita menduga-duga ada kecurigaan nanti akhirnya masyarakat jadi resah," ujar dia.

Selain itu, Patriot merasa ada kejanggalan terhadap kontraktor dan proses lelang yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Kontraktor dan SKPD terkait yang bisa loloskan kontraktornya itu yang namanya dugaan. Yang jelas karena ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara," imbuh dia.

Sementara itu, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, membenarkan bahwa Tim Advokasi PSI Jakarta membuat laporan terkait proyek revitalisasi kawasan Monas. "PSI tadi datang ke KPK dan ditemui tim verifikasi Dumas KPK, berencana melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi di DKI Jakarta," jelas Fikri.

Selain itu, Ali Fikri juga menyatakan, bahwa KPK menerima laporan tersebut. Dan atas laporan yang sudah dibuat oleh Tim Advokasi PSI Jakarta, KPK akan memverifikasi kembali kebenarannya. Namun, lanjut dia, masih ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi oleh Tim Advokasi PSI Jakarta untuk laporan tersebut.

"KPK tentu akan menerima dan menelaah lebih lanjut laporan tersebut setelah semua dokumen-dokumen pelaporan di lengkapi lebih dahulu oleh pelapor," tandas dia. (dni/bar)